

ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Rimky Mandala Putra Simanjuntak¹⁾, Sahala Purba²⁾, Erisa Antheresya Butar Butar³⁾

^{1),2),3)} Universitas Methodist Indonesia

²⁾ sahala824@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari berapa antara lain: Skala Otonomi Keuangan Daerah, Besaran Desentralisasi Fiskal, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, Efektivitas Fiskal Daerah, Efisiensi Fiskal Daerah dan Besaran Kontribusi BUMD. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian informasi keuangan daerah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020, pengumpulan data pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis skala keuangan. Hasil penelitian menunjukkan Skala Otonomi Keuangan masih sangat rendah dengan nilai rata-rata 9,40%, Kemandirian Keuangan Daerah sangat tinggi dengan nilai 80,54%, Besaran Desentralisasi Fiskal sebesar 6,89% dikategorikan sangat rendah. Efektivitas PAD sebesar 97,44% termasuk dalam ukuran cukup. Efisiensi PAD pada kelompok sangat efisien dengan nilai 0,92%. Efektivitas Fiskal adalah 96,28% dalam ukuran yang cukup efektif. Efisiensi Fiskal Daerah dengan nilai 6,54% dapat dinyatakan efisien, Besaran kontribusi BUMD dengan nilai 13,23% tergolong rendah. Adapun implikasi penelitian ini sebagai evaluasi untuk pemerintah daerah/pusat dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah Dairi selama 8 tahun ini dilihat dari beberapa aspek.

Keyword: Analisis Informasi Finansial, Performa Finansial, Pemerintah Kabupaten.

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of local governments in terms of how many including: the Regional Financial Autonomy Scale, Fiscal Decentralization Amount, PAD Effectiveness, PAD Efficiency, Regional Fiscal Effectiveness, Regional Fiscal Efficiency, and BUMD Contribution Amount. This research is a quantitative descriptive study with the subject of research on regional financial information in Dairi Regency in 2013-2020, the data collection method used is the documentation method. The data analysis technique used is financial scale analysis. The results show that the Financial Autonomy Scale is still very low with an average value of 9.40%, Regional Financial Independence is very high with a value of 80.54%, and the amount of Fiscal Decentralization of 6.89% is categorized as very low. The effectiveness of PAD of 97.44% is included in the sufficient size. PAD efficiency in the group is very efficient with a value of 0.92%. Fiscal Effectiveness is 96.28% of a fairly effective measure. Regional Fiscal Efficiency with a value of 6.54% can be declared efficient. The amount of BUMD's contribution with a value of 13.23% is relatively low. The implications of this research as an evaluation for the regional/central government and the community in assessing the performance of the Dairi local government for the past 8 years are seen from several aspects.

Keywords: Financial Information Analysis, Financial Performance, District Government

1. PENDAHULUAN

Penyelenggara pusat telah mengeluarkan dua undang-undang (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan (UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Wilayah, 2004). Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diinginkan Penyelenggara wilayah dapat menaikkan kebahagiaan dan kemakmuran warga melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini disebabkan telah terjadi desentralisasi sehingga menghasilkan kemudahan dalam pengendalian bagi penyelenggara dibandingkan dengan sentralisasi, pada saat sudah dilaksanakan UU nomor 23 Tahun 2014 maka Penyelenggara wilayah telah diserahkan tanggung jawab yang menekan lebih berperan aktif dalam mengurus sendiri program penyelenggaran wilayah (Dora dalam jurnal (Siswanto & Maylani, 2022)). Dengan adanya modifikasi sistem pemerintahan juga membawa modifikasi pada sistem hubungan finansial dalam perwujudan otonomi wilayah antara Penyelenggara pusat dan Penyelenggara wilayah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Untuk mewujudkan penyelenggaran otonomi wilayah, maka penyelenggara wilayah diminta untuk melaksanakan program pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga dapat menaikkan peran serta warga dalam pembangunan infrastruktur, serta menaikkan kesetaraan dan keadilan dengan menumbuhkan semua kapasitas yang dipunyai oleh masing-masing wilayah. Otonomi wilayah dapat diyakini sebagai konsep pembangunan dengan menyerahkan tanggung jawab secara luas bagi penyelenggara wilayah dari pusat untuk menaikkan PADnya. Desakan terhadap kenaikan PAD semakin baik seiring dengan banyaknya kewenangan yang dilimpahkan Penyelenggara pusat terhadap Penyelenggara wilayah. Jika dilihat dana perimbangan yang dicairkan dari Penyelenggara pusat ke Penyelenggara wilayah cukup besar tetapi diharapkan penyelenggara wilayah harus kreatif dalam mengalih sumber daya yang ada dalam wilayah tersebut untuk dapat menoptimal perolehan PAD. Oleh karena itu, peneyelenggara wilayah diharapkan dapat mengalih yang dapat menaikkan PADnya. Salah satu kesuksesan peneyelenggara wilayah adalah ketika dapat mengelola finansial sesuai dengan regulasi yang sudah diterbitkan (Susilawati et al., 2018)

Pengendalian finansial wilayah berarti semua program-program seperti Persiapan, perwujudan, administrator, pemberitaan, reponsibility, dan pengawasan finansial wilayah. Aspek yang paling utama dalam pembangunan wilayah adalah adanya pengendalian finansial wilayah yang baik, adanya keterbukaan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang ada. Pengelolaan finansial wilayah harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat mencapai good governance yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Kebebasan dalam melaksanakan belanja APBD-nya harus betul-betul yang tepat sasaran. Oleh sebab itu penyelenggara wilayah harus dapat mengoptimalkan sumber daya dalam menaikkan PADnya. Pada setiap akhir periode penyelenggara wilayah akan menyajikan informasi finansial sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Informasi finansial ini nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis nilai sumber daya ekonomi yang bisa digunakan untuk program pemerintahan, penilaian Keefektifan dan keefisienan suatu entitas peinformasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Informasi finansial yang akan dianalisis dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada yang membutuhkan mengenai bagaimana cara memahami informasi finansial tersebut, dan bagaimana dalam menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam informasi finansial, bagaimana penilaian informasi finansial serta bagaimana pemakai informasi finansial dalam pengambilan putusan (Mahmudi, 2016). Pengukuran performa penyelenggara wilayah

memiliki banyak tujuan, diantaranya yaitu untuk menaikkan performa dan menaikkan akuntabilitas penyelenggara wilayah. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menyebutkan cara uang publik digunakan tetapi harus bisa mengungkapkan apakah uang publik tersebut telah digunakan dengan tepat sasaran secara efektif dan efisien. Pengukuran performa finansial ini dapat dipakai dalam mengukur analisis skala finansial, balanced scorecard dan juga value for money (Munandar, 2017).

Adapun gab dari riset ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Purbandari, 2019) yang mengungkapkan bahwa kemandirian daerah adalah rendah, begitu juga dengan yang dilakukan oleh (Zukhri, 2020) di Provinsi Bangka Belitung dimana kemandirian daerahnya rendah, tetapi dalam derajat ketergantungan daerah sangat tinggi, pada derajat desentralisasi fiskal masuk dalam kategori sedang, sedangkan menurut oleh (Harahap & Nasution, 2019) menyatakan bahwa kota Medan telah independen dan sangat efektif dalam kinerja finansial dalam menjalankan pemerintahan, begitu juga yang dilakukan oleh (Yakub et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien, tetapi kurang efisien dalam pemungutan retribusi daerah karena targetnya tidak tercapai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susanto, 2019) bahwa rasio efektifitas dikelompokkan dalam efektif, tetapi dalam rasio efisiensi sangat tidak efisien, dalam kemandirian juga masih rendah pada Kota Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah & Satriawan, 2021) menyatakan bahwa dalam hal derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sedangkan untuk efektifitas dan efisiensi Kabupaten Madura cukup efektif dan efisien. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Fernando, 2017) rasio derajat desentralisasi berada dalam kategori sedang rasio ketergantungan sangat tinggi, pada rasio kemandirian tergolong rendah, untuk rasio efektifitas sangat efektif tetapi untuk rasio efisiensi sangat tidak efisien di Kabupaten Sleman. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Herdiyana & Andriana, 2020) yang menyatakan bahwa kelemahan daerah terdapat dalam pembelanjaan operasional, tetapi menurut (Karina & Noeryni, 2016) bahwa kinerja keuangan DKI Jakarta sudah baik dari segi rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi, sejalan juga dengan yang dilakukan oleh (Moridu, 2021) yang menyatakan bahwa efisiensi sangat efisien dan juga dari segi efektifitas rata-rata efektif di Kabupaten Banggai, menurut (Nalle et al., 2021) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal masuk dalam kategori sedang, tingkat ketergantungan sangat tinggi diikuti kemandirian keuangan sangat rendah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis performa finansial wilayah dapat dipakai memakai informasi finansial wilayah untuk memahami performa penyelenggara wilayah. Adapun analisis yang dipakai adalah skala finansial sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Kabupaten Dairi ini adalah pecahan dari Kabupaten Tapanuli Utara tahun 1964 yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 15 Kecamatan, 8 keluarahan serta 161 desa. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan Kabupaten Dairi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam mengalih potensi alam yang begitu luas dan subur, sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah tersebut, tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang ini pemerintahan daerah Kabupaten dairi sangat mengharapkan bantuan dari pusat dalam menutupin biaya operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan, bisa dikatakan pemerintah gagal melalukan pemekaran kabupaten karena kabupaten yang dimekarkan akan menambah belanja negara dalam mendanai operasional pemerintahan daerah yang dimekarkan.

Adapun kegunaan dari Riset ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dan tindak lanjut oleh pengambilan keputusan melalui analisis perbandingan laporan finansial

pemerintahan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten Dairi, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk menaikkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Dairi dan juga sumber daya manusia yang dimilikinya.

2. Tinjauan Pustaka

Skala Otonomi Finansial Wilayah

Skala otonomi finansial wilayah adalah skala yang dapat dipakai untuk mengevaluasi otonomi finansial penyelenggara wilayah dalam rangka membiayai pembangunan, layanan kepada warga, dan program pemerintahan lainnya. Skala Otonomi keuangan Wilayah dinampakkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan penghasilan wilayah yang berasal dari sumber lain atau penghasilan transfer. Semakin tinggi skala otonomi finansial wilayah berarti semakin tinggi pula otonomi finansial wilayah (Abdul Halim, 2012).

Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dikalkulasi dengan cara membandingkan total penghasilan transfer yang diterima oleh pemasukan wilayah dengan total pemasukan wilayah Provinsi (Mahmudi, 2016) Semakin tinggi skala ini maka semakin besar tingkat Ketidakmandirian penyelenggara wilayah terhadap Penyelenggara pusat.

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus merupakan tolok ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah untuk mengelola dan memaksimalkan penghasilan. Ukuran desentralisasi merupakan salah satu skala finansial yang dapat dipakai untuk mengatakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan penyelenggara pusat kepada penyelenggara wilayah dalam melaksanakan pembangunan. Skala ini mengatakan ukuran sumbangan PAD terhadap total pemasukan wilayah. Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

Skala Efektifitas Penghasilan Asli Wilayah

Skala Keefektifan mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan dimaksudkan untuk membahas seberapa besar Keefektifan dari program finansial yang dilaksanakan penyelenggara wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan Penghasilan Asli Wilayah

Skala Keefisienan PAD perlu dikalkulasi untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah dalam menyelenggarakan program untuk mendapatkan realisasi penghasilan. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan penyelenggara wilayah untuk mendapatkan PAD dengan realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Semakin kecil nilai skala ini maka semakin efisien performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan penghasilan asli wilayah (Abdul Halim, 2012)

Skala Efektifitas Fiskus wilayah

Keefektifan (hasil guna) adalah ukuran kesuksesan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keefektifan merupakan perbandingan outcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu program atau program terhadap

warga sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2019). Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu analisis yang mencerminkan kemampuan pemerintah wilayah dalam target/anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah (Abdul Halim, 2012).

Skala Keefisienan Fiskus wilayah

Keefisienan berhubungan dengan metode operasi, suatu program dapat dinyatakan efisien apabila suatu produk yang dihasilkan dengan memakai sumber daya dan dana serendah-rendahfisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi biaya untuk mendapatkan pemasukan wilayah dan input merupakan realisasi dari pemasukan wilayah (Mahsun, 2019). Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik/efisien.

Skala Ukuran Sumbangan BUMD

BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 (UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Wilayah, 2014) dan Pasal 1 angka 1 (PP, 2017) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh wilayah. Skala ini berguna untuk mengetahui tingkat sumbangan perusahaan wilayah dalam mendukung penghasilan wilayah. Skala ini dikalkulasi dengan cara membandingkan pemasukan wilayah dari hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan dengan total pemasukan Penghasilan Asli Wilayah (Mahmudi, 2016)

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam riset ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif dengan melihat laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK Sumatera utara selama tahun 2013-2020. Teknik pengumpulan data memakai Teknik dokumentasi. Langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan skala terhadap data finansial yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis sesuai teori dalam sumber dan dideskripsikan dengan memakai kalimat maupun gambar yang dapat memberikan penjelesan mengenai performa finansial (Taras & Artini, 2017) Analisis Informasi finansial dipakai dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam informasi finansial (Mahsun, 2019). Analisis performa finansial yang dilaksanakan pada riset ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi mengenai performa finansial penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi sebagai bahan dalam pengambilan putusan dan penialain terhadap performa finansial penyelenggara wilayah dalam kurun waktu 2013-2020. Skala yang dipakai pada riset ini meliputi: Rasiko Otonomi Finansial, Wilayah, Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah, Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus, Skala Keefektifan PAD, Skala Keefisienan PAD, Skala Keefektifan Fiskus wilayah, Skala Keefisienan Fiskus wilayah, Skala Ukuran Sumbangan BUMD. Data yang dipakai dalam riset ini berupa Informasi Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020.

4. PEMBAHASAN

Skala Otonomi

Skala Otonomi ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi realisasi total PAD dibandingkan dengan penghasilan transfer yang diperoleh oleh Kabupaten Dairi setiap tahunnya, jika rasionya semakin kecil berarti kontribusi realisasi total PAD sangat rendah terhadap penghasilan wilayah, ini berarti pemerintah Kabupaten Dairi selalu mengharapkan dari pusat untuk menutupin biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi. Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 didapat rasionya dibawah 25% artinya bahwa kemampuan finansial Kabupaten Dairi sangat rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

Tabel 1 : Skala Otonomi

| Tahun | Realisasi PAD | Total | Penghasilan Transfer | Skala | Kemampuan Finansial | Pola Hubungan |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 2013 | 29.933.428.377,08 | 678.334.557.335,00 | 4,41% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2014 | 53.525.854.131,23 | 707.094.466.600,00 | 7,57% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2015 | 58.791.848.521,21 | 819.249.914.805,00 | 7,18% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2016 | 68.003.241.760,34 | 975.996.543.461,00 | 6,97% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2017 | 128.489.751.332,00 | 645.607.668.228,00 | 19,90% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2018 | 73.906.829.603,45 | 951.857.095.064,00 | 7,76% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2019 | 74.360.339.717,75 | 826.507.837.823,00 | 9,00% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| 2020 | 89.758.997.873,48 | 721.297.798.264,00 | 12,44% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |
| Rata-rata | 72.096.286.414,57 | 790.743.235.197,50 | 9,40% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif | |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

| indikator | | |
|------------|----------------------|---------------|
| Otonomi(%) | Kemampuan Finansial | Pola Hubungan |
| 0% - 25% | Sangat Rendah Sekali | Instruktif |
| 25% - 50% | Rendah Sekali | Konstruktif |
| 50% - 75% | Sedang | Parsipatif |
| 75% - 100% | Tinggi | Delegatif |

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi otonomi wilayah tersebut. (Abdul Halim, 2012)

Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

Skala Ketidakmandirian finansial wilayah dipakai untuk menganalisis seberapa besar ketidakmandirian finansial wilayah dengan membandingkan antara penghasilan transfer dengan penghasilan wilayah, jika rasionya besar, ini berarti pemerintahan Kabupaten Dairi sangat tergantung kepada pemerintah pusat untuk mendanai operasional penyelenggaraan pemerintahannya. Dari hasil pengamatan yang peneliti analisis selama tahun 2013-2022 cenderung mengalami penurunan dari Tinggi ke Sedang.

Tabel 2 : Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah

| Tahun | Penghasilan Transfer | Penghasilan Wilayah | Skala | Ketidakmandirian |
|-------|----------------------|----------------------|--------|------------------|
| 2013 | 678.334.557.335,00 | 719.212.829.712,08 | 94,32% | Tinggi |
| 2014 | 707.094.466.600,00 | 766.415.851.556,23 | 92,26% | Tinggi |
| 2015 | 819.249.914.805,00 | 889.613.804.786,21 | 92,09% | Tinggi |
| 2016 | 975.996.543.461,00 | 1.062.706.591.682,24 | 91,84% | Tinggi |
| 2017 | 645.607.668.228,00 | 1.386.843.211.560,00 | 46,55% | Rendah |

| | | | | |
|-----------|--------------------|----------------------|--------|---------------|
| 2018 | 951.857.095.064,00 | 1.080.878.465.095,45 | 88,06% | Tinggi |
| 2019 | 826.507.837.823,00 | 1.167.522.159.074,00 | 70,79% | Sedang |
| 2020 | 721.297.798.264,00 | 1.054.826.116.417,00 | 68,38% | Sedang |
| Rata-rata | 790.743.235.197,50 | 1.016.002.378.735,43 | 80,54% | Rendah Sekali |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Indikator

| Ketidakmandirian(%) | Kemampuan Finansial |
|---------------------|---------------------|
| 0% - 25% | Rendah Sekali |
| 25% - 50% | Rendah |
| 50% - 75% | Sedang |
| 75% - 100% | Tinggi |

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi Ketidakmandirian wilayah terhadap penyelenggara pusat. (Mahmudi, 2016)

Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

Skala ini mengukur seberapa besar ukuran desentralisasi fiskus dalam menghasilkan penghasilan asli wilayah dengan mengukur penghasilan asli wilayah dengan penghasilan wilayah, semakin tinggi rasionya maka semakin optimal penyelenggaraan wilayah dalam memperoleh penghasilan asli wilayahnya tersebut (Mahmudi, 2016). Dari hasil pengamatan selama tahun 2013-2020 rasionya dikategorikan rendah sekali.

Tabel 3 : Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus

| Tahun | Penghasilan Asli Wilayah | Penghasilan Wilayah | Skala | Indikator |
|-----------|--------------------------|----------------------|-------|---------------|
| 2013 | 29.933.428.377,08 | 719.212.829.712,08 | 4,16% | Rendah Sekali |
| 2014 | 53.525.854.131,23 | 766.415.851.556,23 | 6,98% | Rendah Sekali |
| 2015 | 58.791.848.521,21 | 889.613.804.786,21 | 6,61% | Rendah Sekali |
| 2016 | 68.003.241.760,34 | 1.062.706.591.682,24 | 6,40% | Rendah Sekali |
| 2017 | 128.489.751.332,00 | 1.386.843.211.560,00 | 9,26% | Rendah Sekali |
| 2018 | 73.906.829.603,45 | 1.080.878.465.095,45 | 6,84% | Rendah Sekali |
| 2019 | 74.360.339.717,75 | 1.167.522.159.074,00 | 6,37% | Rendah Sekali |
| 2020 | 89.758.997.873,48 | 1.054.826.116.417,00 | 8,51% | Rendah Sekali |
| Rata-rata | 72.096.286.414,57 | 1.016.002.378.735,43 | 6,89% | Rendah Sekali |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Indikator

| Skala | Keterangan |
|----------|---------------|
| 0 -10% | Rendah Sekali |
| 10 - 30% | Rendah |

| | |
|----------|---------------|
| 31- 40% | Cukup |
| 41 - 50% | Tinggi |
| >50% | Sangat Tinggi |

Semakin tinggi sumbangan PAD maka semakin tinggi pula kemampuan penyelenggara wilayah dalam melaksanakan desentralisasi (Bisma & Susanto, 2010).

Skala Keefektifan PAD

Skala Keefektifan PAD mencerminkan kemampuan penyelenggara wilayah dalam mewujudkan penghasilan asli wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefektifan PAD mengatakan kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif. Nilai Skala Keefektifan PAD paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 138,97% dan nilai skala terendah pada tahun 2018 sebesar 74,74%. Rata-rata nilai skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi masuk dalam ukuran cukup efektif.

Tabel 4: Skala Keefektifan PAD

| Tahun | Realisasi PAD | Anggaran PAD | Skala | Kemampuan Finansial |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| 2013 | 29.933.428.377,08 | 21.539.585.686,00 | 138,97% | Sangat Efektif |
| 2014 | 53.525.854.131,23 | 59.623.358.250,00 | 89,77% | Kurang Efektif |
| 2015 | 58.791.848.521,21 | 74.240.389.534,00 | 79,19% | Kurang Efektif |
| 2016 | 68.003.241.760,34 | 65.844.330.338,63 | 103,28% | Sangat Efektif |
| 2017 | 128.489.751.332,00 | 123.494.508.015,00 | 104,04% | Sangat Efektif |
| 2018 | 73.906.829.603,45 | 98.882.460.926,00 | 74,74% | Kurang Efektif |
| 2019 | 74.360.339.717,75 | 86.180.996.000,00 | 86,28% | Cukup Efektif |
| 2020 | 89.758.997.873,48 | 86.927.335.000,00 | 103,26% | Sangat Efektif |
| Rata-rata | 72.096.286.414,57 | 77.091.620.468,63 | 97,44% | Cukup Efektif |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

| Indikator | |
|-----------------------|---------------------|
| Skala Efektifitas (%) | Kemampuan Finansial |
| >100 | Sangat Efektif |
| 100 | Efektif |
| 90 – 99 | Cukup Efektif |
| 75 – 89 | Kurang Efektif |
| < 75 | Tidak Efektif |

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan PAD

Skala Keefisienan PAD ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien penyelenggara pemerintah dalam melakukan pemungutan biaya perolehan PAD dibandingkan dengan realisasi PAD yang diperoleh pada periode tersebut, semakin kecil rasionya maka semakin efisien penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan pembiayaan perolehan PAD. Dari hasil pengamatan menyatakan bahwa keefisienan PAD selama tahun 2013-2020

cukup fluktuatif dengan adanya kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana skala keefisienan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,38% sedangkan terendahnya terdapat di tahun 2018 sebesar 0,34%. Tetapi semuanya masih dalam kategori sangat efisien

Tabel 5: Perhitungan Skala Keefisienan PAD

| Tahun | Biaya Perolehan PAD | Realisasi PAD | Skala | Kemampuan Finansial |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|---------------------|
| 2013 | 410.133.617,00 | 29.933.428.377,08 | 1,37% | Sangat Efisien |
| 2014 | 736.050.000,00 | 53.525.854.131,23 | 1,38% | Sangat Efisien |
| 2015 | 558.751.411,00 | 58.791.848.521,21 | 0,95% | Sangat Efisien |
| 2016 | 629.298.145,00 | 68.003.241.760,34 | 0,93% | Sangat Efisien |
| 2017 | 666.666.055,00 | 128.489.751.332,00 | 0,52% | Sangat Efisien |
| 2018 | 252.418.380,00 | 73.906.829.603,45 | 0,34% | Sangat Efisien |
| 2019 | 773.815.089,00 | 74.360.339.717,75 | 1,04% | Sangat Efisien |
| 2020 | 759.701.196,00 | 89.758.997.873,48 | 0,85% | Sangat Efisien |
| Rata-rata | 598.354.236,63 | 72.096.286.414,57 | 0,92% | Sangat Efisien |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

| Indikator | |
|-----------------|---------------------|
| Keefisienan (%) | Kemampuan Finansial |
| < 10% | Sangat Efisien |
| 10% - 20% | Efisien |
| 21% - 30% | Cukup Efisien |
| 31% - 40% | Kurang Efisien |
| > 40% | Tidak Efisien |

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefektifan Fiskus wilayah

Analisis efektifitas fiskus wilayah yaitu menganalisis kemampuan pemerintah wilayah dalam mendapatkan penghasilan asli wilayah dengan cara membandingkan realisasi fiskus wilayah dengan anggaran fiskus wilayah (Abdul Halim, 2012). Hasil riset mengatakan kalau nilai Keefektifan fiskus wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahun. Nilai Keefektifan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 123,91% atau mengalami kenaikan sebesar 30,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara nilai terendah terjadi di tahun 2020 sebesar 75,67%.

Tabel 6: Skala Keefektifan Fiskus wilayah

| Tahun | Realisasi Fiskus wilayah | Anggaran Fiskus wilayah | Skala |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------|
| 2013 | 4.792.980.780,05 | 4.720.000.000,00 | 101,55% |
| 2014 | 7.339.512.429,00 | 7.226.000.000,00 | 101,57% |
| 2015 | 7.715.031.033,50 | 8.266.000.000,00 | 93,33% |
| 2016 | 8.654.027.559,70 | 9.266.000.000,00 | 93,40% |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| 2017 | 11.481.804.235,24 | 9.266.000.000,00 | 123,91% |
| 2018 | 11.708.281.188,90 | 13.822.000.000,00 | 84,71% |
| 2019 | 13.810.919.111,00 | 14.372.000.000,00 | 96,10% |
| 2020 | 13.398.479.706,00 | 17.706.000.000,00 | 75,67% |
| Rata-rata | 9.862.629.505,42 | 10.580.500.000,00 | 96,28% |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

| Indikator | |
|-----------------------|---------------------|
| Skala Efektifitas (%) | Kemampuan Finansial |
| >100 | Sangat Efektif |
| 100 | Efektif |
| 90 – 99 | Cukup Efektif |
| 75 – 89 | Kurang Efektif |
| < 75 | Tidak Efektif |

Semakin tinggi skala maka semakin tinggi kemampuan penyelenggara wilayah dalam memobilisasi pemasukan PAD sesuai dengan anggarannya. (Mahmudi, 2016)

Skala Keefisienan Fiskus wilayah

Performa penyelenggara wilayah dalam melakukan pengumpulan fiskus wilayah diukurkan efisien apabila skala yang dicapai kurang dari 10% atau semakin kecil nilai skala maka semakin baik atau efisien. Hasil riset mengatakan bahwa nilai skala keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cukup fluktuatif dengan adanya beberapa kenaikan dan pengurangan setiap tahunnya. Nilai Skala keefisienan fiskus wilayah paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,03% atau mencerminkan tingkat keefisienan yang paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nilai skala keefisienan fiskus wilayah terendah pada tahun 2018 sebesar 2,16% atau memiliki tingkat keefisienan paling tinggi. Meskipun nilai skala keefisienan fiskus wilayah selalu menemui kenaikan, akan tetapi tingkat keefisienan fiskus wilayah Kabupaten Dairi masuk dalam ukuran efisien.

Tabel 7: Skala Keefisienan Fiskus wilayah

| Tahun | Biaya Pengumpulan | Realisasi Fiskus Wilayah | Skala | Kemampuan Finansial |
|-------|-------------------|--------------------------|--------|---------------------|
| 2013 | 410.133.617,00 | 4.792.980.780,05 | 8,56% | Efisien |
| 2014 | 736.050.000,00 | 7.339.512.429,00 | 10,03% | Tidak Efisien |
| 2015 | 558.751.411,00 | 7.715.031.033,50 | 7,24% | Efisien |
| 2016 | 629.298.145,00 | 8.654.027.559,70 | 7,27% | Efisien |
| 2017 | 666.666.055,00 | 11.481.804.235,24 | 5,81% | Efisien |
| 2018 | 252.418.380,00 | 11.708.281.188,90 | 2,16% | Sangat Efisien |
| 2019 | 773.815.089,00 | 13.810.919.111,00 | 5,60% | Efisien |
| 2020 | 759.701.196,00 | 13.398.479.706,00 | 5,67% | Efisien |

| | | | | |
|-----------|----------------|------------------|-------|---------|
| Rata-rata | 598.354.236,00 | 9.862.629.505,42 | 6,54% | Efisien |
|-----------|----------------|------------------|-------|---------|

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

| indikator | |
|-----------------|---------------------|
| Keefisienan (%) | Kemampuan Finansial |
| < 10% | Sangat Efisien |
| 10% - 20% | Efisien |
| 21% - 30% | Cukup Efisien |
| 31% - 40% | Kurang Efisien |
| > 40% | Tidak Efisien |

Performa penyelenggara wilayah otonom jika kurang dari 10% atau semakin kecil maka dapat dinyatakan semakin baik/efisien. (Mahsun, 2019)

Skala Ukuran Sumbangan BUMD

Skala ini berguna untuk mengevaluasi sebesar besar laba BUMD dapat berkontribusi terhadap penghasilan wilayah Kabupaten Dairi dengan cara membandingkan laba BUMD dengan Realisasi PAD (Mahmudi, 2016). Hasil riset mengatakan bahwa nilai ukuran sumbangan BUMD Kabupaten Dairi tahun 2013-2020 cenderung fluktuatif. Skala ukuran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 20,91% dan paling rendah pada tahun 2014 sebesar 7,81%.

Tabel 8: Skala Ukuran Sumbangan BUMD

| Tahun | Laba BUMD | Realisasi PAD | Skala |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|
| 2013 | 6.259.973.736,00 | 29.933.428.377,08 | 20,91% |
| 2014 | 4.182.151.408,00 | 53.525.854.131,23 | 7,81% |
| 2015 | 7.026.750.893,00 | 58.791.848.521,21 | 11,95% |
| 2016 | 10.029.770.339,00 | 68.003.241.760,34 | 14,75% |
| 2017 | 10.779.522.587,00 | 128.489.751.332,00 | 8,39% |
| 2018 | 12.998.925.226,00 | 73.906.829.603,45 | 17,59% |
| 2019 | 6.770.706.298,00 | 74.360.339.717,75 | 9,11% |
| 2020 | 13.765.641.353,00 | 89.758.997.873,48 | 15,34% |
| Rata-rata | 8.976.680.230,00 | 72.096.286.414,57 | 13,23% |

Sumber : Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi Hasil Pemeriksaan BPK Sumut, 2022

Skala Otonomi Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 9,40% memiliki kemampuan finansial yang rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi dalam rangka membiayai pembangunan, layanan dan program pemerintahan masih sangat rendah sekali. Skala Ketidakmandirian Finansial Kabupaten Dairi untuk tahun 2013-2020 dengan rata-rata skala 80,54% memiliki tingkat Ketidakmandirian yang tinggi. Dimana Ketidakmandirian Kabupaten Dairi terhadap Penyelenggara pusat ialah tinggi. Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,89% memiliki tingkat sumbangan yang rendah sekali. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi dalam mengelola dan memaksimalkan penghasilan masih rendah sekali.

Skala Keefektifan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 97,44% memiliki kemampuan yang cukup efektif. Dimana kemampuan Kabupaten Dairi

dalam mewujudkan Penghasilan Asli Wilayah yang diprogramkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil wilayah. Skala Keefisienan PAD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 0,92% memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Dairi dalam melakukan pengumpulan PAD sangat efisien. Skala Keefektifan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 96,82% .

Skala Keefisienan Fiskus wilayah Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 6,54% memiliki tingkat keefisienan yang sangat efisien. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa performa Kabupaten Dairi dalam melakukan pengumpulan Fiskus wilayah sangat efisien. Skala Ukuran Sumbangan BUMD Kabupaten Dairi untuk tahun 2013 - 2020 dengan rata-rata skala 13,23%. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat sumbangan perusahaan wilayah terhadap penghasilan pemerintah Kabupaten Dairi cukup tinggi.

5. KESIMPULAN

Dari hasil riset diatas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa rata-rata skala pengukuran finansial di Kabupaten Dairi selama tahun 2013-2020 mulai dari skala otonomi daerah sebesar 9,4% dalam kategori rendah sekali dengan pola instruktif, skala ketidakmandirian sebesar 80,54% masuk kelompok tinggi, skala ukuran desentralisasi fiskus sebesar 6,89% dalam kategori rendah sekali, skala keefektifan PAD 97,49% dalam kategori cukup efektif, skala keefisienan PAD sebesar 0,92% dalam kategori sangat efisien, skala keefektifan fiskus wilayah sebesar 96,28% cukup efektif, skala keefisienan fiskus wilayah sebesar 6,54% masuk kategori sangat efisien dan skala ukuran sumbangan BUMD sebesar 13,23% masuk kategori rendah.

Saran untuk Penyelenggara wilayah adalah agar dapat memaksimalkan pemasukan dari wilayah masing-masing agar dapat mempercepat penyusunan PERDA dan mengubah tarif retribusi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyelenggara Kabupaten Dairi hendaknya mengoptimalkan penghasilan asli dari wilayahnya tersebut dan juga mendukung pelaku UMKM yang dapat menambah penghasilan asli dari wilayah Kabupaten Dairi, terlebih masih banyaknya sumber daya alam yang menganggur yang belum dapat dioptimalkan oleh pemerintahan daerah. Begitu juga kepada penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi harus betul-betul membelanjakan sesuai dengan yang sudah dianggarkan secara efisien dan efektif serta melakukan pencatatan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan yang terakhir penyelenggara pemerintahan hendaknya melakukan sosialisasi melalui media massa ataupun media elektronik akan pentingnya melakukan pembayaran pajak dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha dan memberikan penyuluhan bagaimana cara pembayaran pajak dengan mudah dan efektif, sehingga dengan adanya kemudahan-kemudahan ini maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak sehingga dapat menaikkan penghasilan asli daerah. Begitu juga dengan BUMD yang terdapat di wilayah penyelenggara Dairi agar dapat lebih optimal dalam pencapaian keuntungan BUMD yang dimiliki, sehingga juga dapat menghasilkan kenaikan pendapatan asli daerah tersebut.

Adapun yang menjadi Implikasi dari Riset ini adalah dengan hasil analisis finansial pemerintahan Dairi selama 8 tahun (2013-2020) dengan menggunakan 8 skala pengukuran bisa menjadi evaluasi kedepannya untuk pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah ataupun pusat dan begitu juga dengan masyarakat setempat akan kinerja penyelenggaraan pemerintah selama tahun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.)*. Penerbit Salemba Empat.

- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75–86.
- Harahap, P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14.
- Herdiyana, D., & Andriana, N. (2020). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Owner*, 4(1), 191–203. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222>
- Karina, A., & Noeryni, D. (2016). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 1–22.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08(02), 90–97. [file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article Text-3266-1-10-20210807 \(2\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/1643-Article%20Text-3266-1-10-20210807%20(2).pdf)
- Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. *Tesis*.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi*, 17(1), 184–197. [https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle et al. - 2021 - Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pe.pdf](https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8067%0Afiles/1318/Nalle%20et%20al.%20-%202021%20-%20Analisis%20kemampuan%20keuangan%20daerah%20dalam%20rangka%20pe.pdf)
- PP. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*. <http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537>
- Purbandari, T. (2019). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk Mewujudkan Efisiensi Anggaran (Studi pada Kabupaten Madiun). *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah*, 1(1), 15–33. <https://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/view/14%0Ahttps://jurnal.madiunkab.go.id/index.php/bp/article/download/14/15>
- Sakinah, L., & Satriawan, B. (2021). Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Empat Kabupaten Di Madura 2015-2019. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(2), 249–271.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- UU, R. (2014). *UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- UU RI. (2004). *UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah

serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10789>

Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>

Biodata Penulis



Rimky Mandala Putra Simanjuntak, SE, M.Si, Lahir di Medan, 17 Juli 1989. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung dan lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2018. Sejak tahun 2019 sampai sekarang penulis menjadi dosen tetap di Universitas Methodist Indonesia.
Email: rimkysimanjuntak@gmail.com



Sahala Purba, SE, M.Si, Lahir di Medan, 1 September 1973. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Medan Area dan lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2009. Sejak tahun 2018 sampai sekarang sedang menempuh S3 Akuntansi di Universitas Sumatera Utara, Sejak tahun 2012 sampai sekarang penulis menjadi dosen tetap di Universitas Methodist Indonesia dan aktif menulis jurnal nasional maupun internasional bereputasi.

Email: sahala824@gmail.com



Erissa Antheresya Butar Butar. Lahir di Sidikalang, 05 April 2001. Menempuh pendidikan Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia. Saat ini masih berstatus mahasiswa aktif semester VII di Universitas Methodist Indonesia.
Email : antheresya@gmail.com